

**ANALISIS PENGARUH KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, TRANSPARANSI DAN PEMANFAATAN  
TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH DI KOTA MEDAN**

**<sup>1</sup>IRNA TRIANNUR LUBIS, <sup>2</sup>YUNI SHARA**

**<sup>1</sup>UNIVERSITAS BATTUTA, <sup>2</sup>UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA AL WASHLIYAH**

**<sup>1</sup>irnatriannurlubis@gmail.com, <sup>2</sup>yunishara@umnaw.ac.id**

**ABSTRACT**

This study aims to find out the factors that affect the constituents of APBD in the city of Medan. The data used is primary data using questionnaires given to all accounting entities in the Medan City Government environment of 34 Regional Device Organizations (OPD). The results of the analysis showed that the competence of human resources and the utilization of information technology had a significant effect on the preparation of APBD, while transparency had no significant effect on the preparation of APBD. The results of this study suggest that the Medan City Government pay attention to human resource competence, transparency.

**Keywords : Human Resource Competence, Transparency, Utilization Of Information Technology, Preparation Of APBD**

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah telah menghasilkan dinamika perkembangan dan perbaikan sistem keuangan dan akuntansi di pemerintahan daerah menuju pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan akuntabel (Verasvera, 2016). Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, seperti UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang menjadi peraturan bagi berbagai pengelolaan keuangan daerah dan pusat. Pemerintah Kota Medan merupakan salah satu organisasi sektor publik di Provinsi Sumatera Utara yang telah menerapkan kebijakan ekonomi yang fokus pada pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan progresif. Sebagai sektor publik, Pemerintah Kota Medan harus memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran warga Kota Medan, termasuk mengatur pengelolaan keuangan daerah dan memanfaatkan hasil pengelolaan tersebut dalam memaksimalkan potensi yang ada untuk peningkatan pembangunan. Penganggaran adalah tugas teknis. Kata-kata seperti keuangan, angka, dan perkiraan muncul ketika seseorang memikirkan "anggaran". Namun, di balik keseluruhan gambaran teknis yang berkaitan dengan anggaran, ada orang-orangnya. Manusia yang menyusun anggaran dan manusia yang harus hidup dengan anggaran. Anggaran diterima secara luas sebagai fokus kegiatan perencanaan jangka pendek dan dasar dari sistem pengendalian (Lubis, 2017). Pengertian penyusunan APBD bila mengacu pada model terbaik, tidak ada satu model pun yang dapat dikatakan paling ber. Jika mengacu pada nilai-nilai yang ingin dicapai, juga tidak ada nilai tunggal yang paling penting. penyusunan APBD terkait dengan pemenuhan nilai ekonomi, efisiensi, efektivitas, pemerataan atau kewajaran, akuntabilitas, dan daya tanggap. Ekonomis artinya anggaran selalu bertambah; Efisien artinya alokasi anggaran sesuai dengan hasil yang diperoleh; Efektif artinya alokasi anggaran sesuai dengan tujuan yang direncanakan; Equiry atau Adil berarti peruntukan dan hasilnya sesuai dengan nilai kewajaran. Saat ini perumusan APBD di Kota Medan belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari hasil LKPD Kota Medan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 masih mendapatkan opini WDP (Wajar dengan Pengecualian). Penyusunan APBD Kota Medan masih belum optimal, selain itu rendahnya penyerapan anggaran dikarenakan pekerjaan fisik yang belum selesai oleh OPD yang memiliki pekerjaan fisik dengan pagu anggaran yang cukup besar. , seperti Dinas Pekerjaan Umum (PU), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Dinas Perumahan dan Penataan Ruang Kota Medan. Belum optimalnya penyusunan APBD berbasis kinerja di kota Medan juga disebabkan keterbatasan daerah dalam hal

sumber daya manusia yang tidak mampu menyusun anggaran berbasis kinerja sesuai yang diharapkan dan kurangnya komitmen dari seluruh komponen organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Diastuti (2017) pada judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan anggaran berbasis kinerja (studi pada organisasi perangkat daerah Kabupaten Boyolali) memiliki hasil bahwa SDM, komitmen organisasi, penghargaan dan sanksi berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Sementara itu, gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pradana, dkk. (2014) yang meneliti mengenai determinan implementasi anggaran berbasis kinerja Badan Layanan Umum (Pada Universitas Negeri Semarang). Dari analisis regresi berganda memiliki hasil bahwa ketersediaan SDM, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, remunerasi serta punishment tidak berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja.. Sedangkan reward berpengaruh terhadap penerapan anggaran berbasis kinerja. Wandari, dkk. (2015) melakukan penelitian studi kasus mengenai kinerja anggaran berkonsep value for money pada Instansi Pemerintah di Kabupaten Buleleng. Dari analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa akuntabilitas, transparansi, ketepatan waktu, pengawasan internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja anggaran berkonsep value for money. Sedangkan Asrida (2012) pada hasil penelitian kinerja penyusunan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Bireuen. Dari analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa variabel akuntabilitas lebih berpengaruh terhadap kinerja bila dibandingkan dengan variabel transparansi keuangan. Nawastri (2015) melakukan penelitian studi kasus mengenai efektivitas penerapan anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Kabupaten Grobongan. Dari analisis regresi berganda dapat disimpulkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, Informasi, penggunaan anggaran, dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas anggaran berbasis kinerja. Sedangkan penelitian Riandani (2017) yang berjudul pengaruh kompetensi sdm, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kab. Limapuluh Kota) menunjukkan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Penyusunan APBD**

Penyusunan APBD untuk seluruh daerah di Indonesia mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam Permendagri ini, jadwal penyusunan APBD normatif dapat dicermati dalam skema berikut. Dalam satu tahun anggaran, mulai bulan Januari sampai dengan Desember kegiatan penyusunan APBD harus berlangsung sesuai dengan jadwal yang ada. APBD diawali dengan pelaksanaan Musrenbang, yang kemudian dirumuskan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan diakhiri dengan pengesahan RAPBD menjadi APBD melalui rapat paripurna DPRD yang bersangkutan.

### **Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sebagian besar lemahnya sumber daya manusia disebabkan oleh lemahnya kemampuan mengidentifikasi potensi pendapatan daerah. Jumlah pegawai yang banyak juga membuat belanja tidak langsung selalu lebih besar dari belanja langsung. Mengingat perencanaan dan penganggaran terintegrasi secara ideal, maka faktor kapabilitas (kapasitas) sumber daya manusia menjadi penting, termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan yang nyata sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat serta selaras dengan prioritas nasional. Sumber daya manusia yang lemah juga ditunjukkan dengan sebagian besar jabatan TAPD di setiap lokasi penelitian relatif tidak stabil, dengan rata-rata dua tahun telah dirotasi ke tempat atau jabatan lain sehingga jabatan TAPD hampir selalu diisi oleh pegawai yang relatif baru dan harus belajar lagi dalam proses. penganggaran.

### **Transparansi**

Teori pemerintah menjelaskan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi yang berlaku untuk kepentingan publik secara langsung kepada mereka yang membutuhkannya. Menurut Standar Akuntansi.

### **Pemanfaatan Teknologi Informasi**

Pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan dan pembangunan dalam penyelesaian tugas khususnya dalam proses penyusunan anggaran pendapatan daerah menjadi sangat penting. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah, mengolah, memperoleh, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara agar menghasilkan informasi yang ber, hasil informasi tersebut relevan, akurat, dan tepat waktu bagi organisasi pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan informasi strategis. dalam menentukan pengambilan keputusan (Sutabri, 2012). Teknologi informasi meliputi perangkat keras dan perangkat lunak pada komputer, berbagai peralatan kantor berupa elektronik, peralatan pabrik hingga telekomunikasi (Mulyadi, 2014).

### **METODE**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan menggunakan kuesioner dan wawancara dengan sampel sebanyak 76 responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan Partial Least Square (PLS). PLS merupakan persamaan Structural Equation Modeling (SEM) berbasis komponen atau varian. PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM berbasis kovarians menjadi berbasis varian (Ghozali dan Latan, 2015).

### **HASIL DAN DISKUSI**

#### **Hasil Karakteristik Responden**

Kuesioner disampaikan kepada responden dengan cara menyerahkan langsung kepada responden, menunggu mereka untuk mengisinya dan kembali langsung kepada peneliti. Cara mengembalikan kuesioner secara langsung dengan memberikan ruang diskusi antara peneliti dan responden untuk menghindari bias dalam memahami kuesioner yang diberikan. Seluruh kuesioner yang disebar tidak memiliki kuesioner yang cacat, sehingga kuesioner yang digunakan untuk melakukan analisis data adalah 76. Tingkat pengembalian kuesioner disajikan pada Tabel 5.1 di bawah ini.

**Tabel 5.1. Tingkat Pengembalian Kuesioner**

<b>No.</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Persentase</b>
1	Kuesioner yang disebar	76	100%
2	Kuesioner yang diterima	76	100%
3	Kuesioner yang rusak/ cacat	-	-
4	Kuesioner yang digunakan dalam penelitian	76	100%

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2021)

Berdasarkan data penelitian yang telah dikumpulkan, diperoleh data tentang responden yang memiliki karakteristik data berdasarkan: 1) jenis kelamin, 2) pendidikan terakhir, 3) jurusan pendidikan terakhir, dan 4) masa kerja. Tabel 5.2 sampai 5.5 memberikan ringkasan karakteristik responden.

**Tabel 5.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Frekuensi</b>	<b>Persentase(%)</b>
1	Laki Laki	59	77,63
2	Perempuan	17	22,37
	Total	76	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2021)

Berdasarkan data pada Tabel 5.2 mengenai karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin di atas dapat diketahui bahwa berdasarkan jenis kelamin responden, dari 76 responden dalam penelitian ini dapat diketahui sebanyak 59 orang atau 77,63% berjenis kelamin laki-laki dan sisanya 17 orang atau 22,37% adalah perempuan. Jumlah responden pria dan wanita sangat berbeda. Selanjutnya responden juga diukur berdasarkan tingkat pendidikan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
1	S3	2	2,63
2	S2	33	43,42
3	S1	41	53,94
Total		76	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 5.3 mengenai karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat pendidikan terakhir responden, dari 76 responden dalam penelitian ini diketahui 2 orang berpendidikan doktor atau 2,63% , 33 orang berpendidikan S2 atau 43,42%, dan sisanya berpendidikan S1 sebanyak 41 orang atau sebanyak 53,94%. Sebagian besar responden dalam penelitian ini berpendidikan sarjana, yang berarti tingkat pendidikannya baik. Selanjutnya responden juga diukur berdasarkan latar belakang pendidikannya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase(%)
1	Akuntansi	35	46,05
2	Non Akuntansi	41	53,94
Total		76	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 5.4 mengenai responden berdasarkan latar belakang pendidikan, diketahui bahwa berdasarkan pendidikan terakhir responden, dari 76 responden dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa 35 orang adalah jurusan akuntansi atau 46,05% tidak jurusan akuntansi atau sebesar 53, 94%. Keberagaman latar belakang pendidikan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) disebabkan dalam menjalankan tugas penyusunan APBD membutuhkan berbagai pengetahuan, tidak hanya fokus pada akuntansi saja. Selanjutnya responden juga diukur berdasarkan masa kerja dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.5. Karakteristik Responden Berdasarkan Masa Kerja**

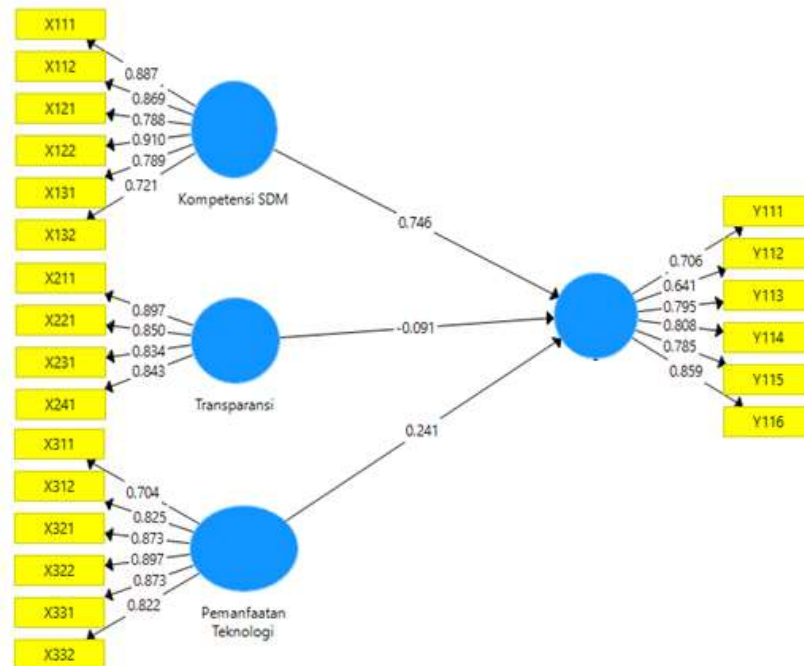
No	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase(%)
1	1 -10 thn	7	9,21
2	11 – 20 thn	26	34,21
3	21 – 30 thn	34	44,73
4	> 31 thn	9	11,84
Total		76	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah (2021)

Berdasarkan masa kerja responden, dari 76 responden dalam penelitian ini diketahui responden pernah memiliki masa kerja 1-10 tahun yaitu 7 orang atau 9,21%, 26 orang dengan masa kerja 11-20 tahun atau 34,21%. , responden dengan masa kerja 21-30 tahun sebanyak 34 orang atau 44,73%, dan masa kerja >31 tahun sebanyak 9 orang atau 11,84%.

#### **Hasil Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)**

Pengujian outer model diawali dengan mengestimasi atau mengestimasi parameter yaitu dengan menghitung algoritma PLS dengan hasil sebagai berikut.



Gambar 5.1. Tampilan Output Perhitungan Algoritma PLS  
Sumber : keluaran PLS

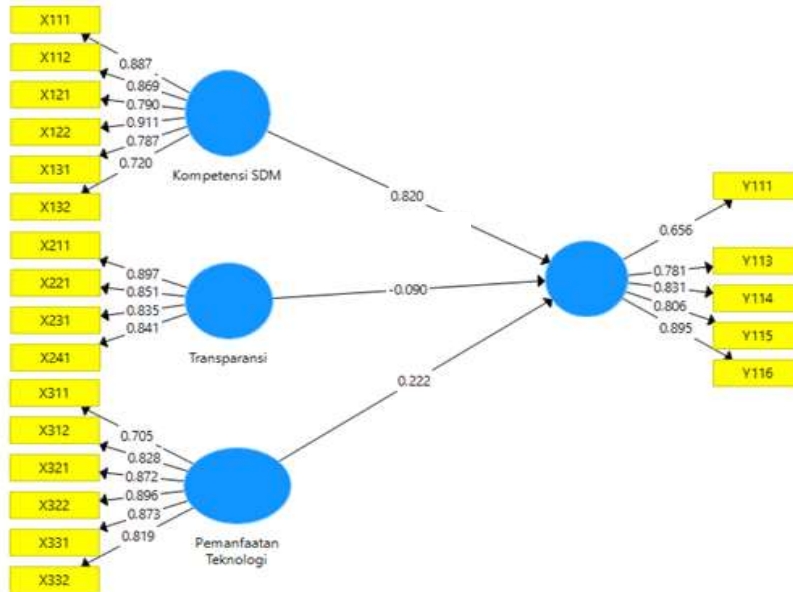
Dari hasil analisis tersebut dapat dilakukan evaluasi model pengukuran (outermodel), yaitu dengan menguji validitas konvergen, validitas diskriminan dan reliabilitas.

### Hasil Uji Validitas Konvergen

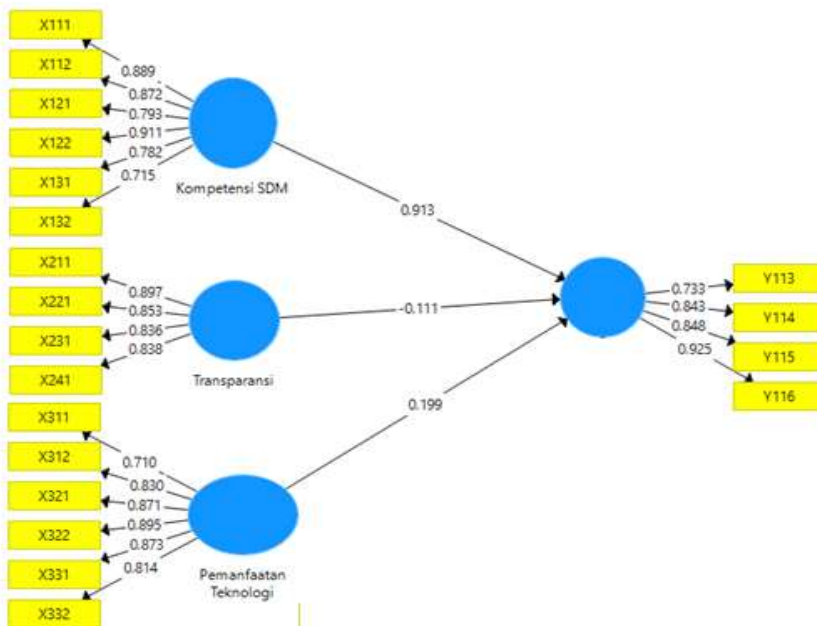
Berdasarkan Tabel 5.7 terlihat bahwa indikator-indikator yang paling dominan menyumbang konstruk latennya adalah sebagai berikut :

1. Indikator terbaik dalam membentuk variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) adalah X122 dengan loading factor tertinggi sebesar 0,910, sehingga jika pengambil keputusan ingin meningkatkan nilai Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1) maka rekomendasi statistik adalah memprioritaskan peningkatan nilai indikatornya. X122.
2. Indikator terbaik dalam membentuk variabel transparansi (X2) adalah X211 dengan loading factor tertinggi sebesar 0,897, sehingga jika pengambil keputusan ingin meningkatkan nilai transparansi (X2) maka rekomendasi statistik adalah memprioritaskan peningkatan nilai transparansi (X2). indikator X211.
3. Indikator yang paling baik dalam membentuk variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) adalah X322 dengan loading factor tertinggi sebesar 0,897, sehingga jika pengambil keputusan ingin meningkatkan nilai Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3) maka rekomendasi statistik adalah memprioritaskan peningkatan nilai indikator X322.
4. Indikator terbaik dalam pembentukan variabel Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y) adalah Y116 dengan factor loading tertinggi sebesar 0,859, sehingga jika pengambil keputusan ingin meningkatkan nilai Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Y) maka rekomendasi statistik adalah memprioritaskan peningkatan nilai indikator Y116.

Setelah dilakukan reduksi indikator pada masing-masing variabel maka dilakukan kembali perhitungan Algoritma PLS dan didapatkan output sebagai berikut pada Gambar 5.2 :



Gambar 5.2. Tampilan Output Perhitungan Algoritma PLS Setelah Reduksi 1  
 Sumber : keluaran PLS



Gambar 5.3. Tampilan Output Perhitungan Algoritma PLS Setelah Reduksi 2  
 Sumber : keluaran PLS

Penyusunan APBD = 0,913 Kompetensi Sumber Daya Manusia -0,111 Transparansi + 0,199 Pemanfaatan Teknologi Informasi. Diketahui nilai koefisien variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar 0,913 yang bernilai positif artinya setiap peningkatan nilai Kompetensi Sumber Daya Manusia sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 0,913% dengan asumsi variabel dalam model adalah

tetap. Nilai tersebut dapat diartikan sebagai variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia yang berpengaruh positif terhadap Penyusunan APBD. Nilai koefisien variabel Transparansi sebesar -0,111 yang bernilai negatif artinya setiap kenaikan nilai Transparansi sebesar satu satuan akan menurunkan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 0,111% dengan asumsi variabel dalam model bersifat tetap. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel Transparansi berpengaruh negatif terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Nilai koefisien variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar 0,199 yang bernilai positif artinya setiap kenaikan nilai Pemanfaatan Teknologi Informasi sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar 0,199% dengan asumsi variabel dalam model tetap. Nilai tersebut dapat diartikan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap variabel Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### **Hasil Analisis Jalur**

Berdasarkan diagram jalur pada Gambar 5.3 terlihat bahwa faktor yang paling dominan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Motivasi (Z) dengan koefisien jalur tertinggi sebesar 6,269. Berdasarkan Gambar 5.3. persamaan struktural berikut dapat dibentuk :

Penyusunan APBD = 0,906 Kompetensi SDM -0,102 Transparansi + 0,188 Pemanfaatan Teknologi Informasi - 0,063 Motivasi - 0,091 Motivasi \* Kompetensi SDM + 0,085 Motivasi \* Transparansi - 0,003 Motivasi \* Pemanfaatan Teknologi Informasi.

#### **Diskusi**

##### **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Penyusunan APBD**

Kompetensi adalah kemampuan seseorang yang menjadikan kinerja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan menjadi dasar pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang memadai. Dalam kompetensi diperlukan suatu tingkatan untuk menentukan tingkat kinerja yang diharapkan baik dalam kategori baik maupun rata-rata. Penetapan kompetensi tentunya dapat dijadikan dasar dalam proses seleksi, perencanaan, evaluasi dan pengembangan SDM. Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD. Hal ini terlihat dari nilai t statistik sebesar 9,356 dan p-value sebesar 0,000. Karena nilai t-statistik lebih besar dari 1,99 dan p-value > 0,05 maka hipotesis diterima. Hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang ada, dimana implikasi dari teori signaling memberikan dampak positif. Hal ini membuktikan rendahnya kompetensi SDM Pemkot Medan mengenai penyusunan APBD sehingga menghasilkan APBD yang ber. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Raja (2017) yang menemukan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap laporan keuangan. Sedangkan hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) tentang pengaruh kompetensi SDM. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan.

##### **Pengaruh Transparansi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Transparansi adalah asas yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, pelaksanaan, dan hasil yang dicapai. Transparansi merupakan salah satu ciri pemerintahan yang baik. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan untuk memperoleh informasi yang berlaku untuk kepentingan publik secara langsung kepada mereka yang membutuhkannya. Hal ini terlihat dari nilai t-statistik sebesar 1,344 dan p-value sebesar 0,344. Karena nilai t statistik lebih kecil dari 1,99 dan p-value > 0,05 maka hipotesis ditolak, artinya transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap laporan keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota) bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Asrida (2012) yang menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh terhadap kinerja penganggaran.

##### **Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah**

Pemanfaatan teknologi informasi untuk percepatan dan pembangunan dalam penyelesaian tugas khususnya dalam proses penyusunan anggaran pendapatan daerah menjadi sangat penting. Teknologi informasi digunakan untuk mengolah,

mengolah, memperoleh, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dengan berbagai cara agar menghasilkan informasi yang ber, hasil informasi tersebut relevan, akurat, dan tepat waktu bagi organisasi pribadi, bisnis dan pemerintahan yang merupakan informasi strategis. dalam menentukan pengambilan keputusan. Hal ini terlihat dari nilai t statistik sebesar 2,258 dan p-value sebesar 0,024. Karena nilai t-statistic lebih besar dari 1,99 dan p-value > 0,05 maka hipotesis diterima, artinya penggunaan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penggunaan teknologi informasi, dan pengendalian internal terhadap laporan keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota) yang hasilnya menunjukkan bahwa penggunaan teknologi informasi tidak berpengaruh. signifikan terhadap laporan keuangan.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD di Pemerintah Kota Medan.
2. Transparansi berpengaruh tidak signifikan terhadap penyusunan APBD di Pemerintah Kota Medan.
3. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Penyusunan APBD pada Pemerintah Kota Medan.

### **SARAN**

Berdasarkan keterbatasan penelitian yang dikemukakan, peneliti berharap penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan. Beberapa saran dari peneliti adalah sebagai berikut :

1. Peneliti selanjutnya dapat menambah jumlah variabel bebas yang menjadi fenomena yang dapat mempengaruhi penyusunan APBD di Pemerintah Kota Medan dan menambah jumlah responden penelitian. Variabel lain seperti akuntabilitas, dan kondisi pemerintah daerah.
2. Bagi Pemerintah Kota Medan agar memperhatikan kompetensi sumber daya manusia, transparansi, pemanfaatan teknologi dan motivasi agar APBD yang dihasilkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat berjalan secara efektif, ekonomis dan efisien.

### **REFERENSI**

Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). Partial Least Square (PLS): Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam Penelitian Bisnis. Yogyakarta: Penerbit Andi.

Achyani, F., & Cahya, BT 2011. Analisis Aspek Rasional dalam Penganggaran Publik Terhadap Efektivitas Pengimplementasian Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Kota Surakarta. Maksimum, Vol 1, No 1.

BPKP. 2005. Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis kinerja (Revisi). Jakarta.

Ghozali, I. (2008). Model persamaan struktur: Konsep dan aplikasi dengan program AMOS 16.0. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS 21. Edisi 7, Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. Jurnal Ekonomi Triwulanan, 128, 1547-1584.

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). Partial Least Squares, Konsep, Teknik Dan Aplikasi Menggunakan Program Smartpls 3.0 Untuk Penelitian Empiris. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Rambut, JF, Ringle, CM, & Sarstedt, M. (2011). PLS-SEM: Memang peluru perak. Jurnal Teori dan Praktik Pemasaran, 19(2), 139-152.

Haryono, Siswoyo (2017). Metode SEM untuk Penelitian Manajemen dengan AMOS LISREL PLS. Yogyakarta : Luxima.



Heidjrachman dan Husnan (2012). Manajemen Personalia. Yogyakarta: Andi.

Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang berubah menjadi Permendagri Nomor 52 Tahun 2015.

Latan, H., & Ghozali, I. (2015). Partial least square konsep, metode dan aplikasi menggunakan program WarpPLS 2.0. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

*Abdullah*, Thamrin., dan Francis Tantri. 2012. Manajemen Pemasaran. PT Raja. Grafindo Persada : Jakarta.

Lubis, Ade Fatma, dkk. 2010. Aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) untuk Penyusunan Skripsi dan Tesis. Pers USU, Medan.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta.

Nafarin, M. 2013. Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga, Cetakan kedua, Buku. 1. Jakarta : Salemba Empat.

Nawawi, Hadari, 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pengelolaan pedoman keuangan daerah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

PP No. 21/2004 pasal 7 ayat 1 dan 2, penganggaran berdasarkan kinerja.

PP Nomor 58 tahun 2005 proses perencanaan dan penyusunan APBD.

Sinulingga S. 2014. Rekayasa Produktivitas. Medan: Pers USU.

Sugiyono. 2012. Penelitian Kualitatif. Bandung : ALFABETA.

\_\_\_\_\_. 2013. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Ke-22, Penerbit CV. Alfabet, Bandung.

\_\_\_\_\_. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Fandy, Tjiptono dan Greforius, Chandra. (2016). Pemasaran Jasa (Prinsip, Penerapan, dan Penelitian), Yogyakarta: Andi.

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 19 menetapkan bahwa APBD.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang No. 32 dan 33 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah.

Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Verasvera, Febrina Astria. 2016. "Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah". Jurnal Manajemen, Vol.15 No.2, Mei, hal. 137-162.

Widodo. 2017. Metodologi Penelitian Populer & Praktis. Jakarta: Rajawali Pers.

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

[www.kemenkeu.djpk.go.id](http://www.kemenkeu.djpk.go.id)